

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Hamid, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- A. Pitto, *Pembuktian dan Kadaluarsa*, Intermasa, Jakarta, 1978.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000.
- Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1980.
- Agus Susilo, *Perbuatan Hukum Publik Yang Melanggar Hukum Dapat Digugat Ke Pengadilan Administrasi*, Ar-ruzz, Yogyakarta, 2006.
- Ali Chaidir, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad): Tahun 1950 s.d. Tahun 1977*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Anna Erliyana dan Seomaryono, *Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*, Primamedia Pustaka, Jakarta, 1999.
- Arief Sidharta, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1886.
- , *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Baharuddin Lopa dan Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinagrafi, Jakarta, 1993.
- Bahtiar Effendi, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1993.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Djoko Prakoso, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Litbang, Yogyakarta, 1983.

- Edi Prajoto, *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional*, Utomo, Bandung, 2006.
- Henry Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari. Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara Dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- , *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- , *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II: Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- , *Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Varia Peradilan Tahun X Nomor 111, Desember 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1995.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction To The Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Philipus Hadjon dan Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

- Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, *Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN*, Jakarta, 2005.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara: PTUN Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Beribawa*, Universitas Atama Jaya, Yogyakarta, 2009.
- , *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Rinaldi Mirsa, *Elemen Tata Ruang Kota*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Rinto Manulang, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah, Dan Perizinannya*, Buku Pintar, Jakarta, 2011.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta, 2003.
- Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya Dalam Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 1977.
- S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- , *Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- , *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

- , *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1979.
- Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntunan Praktik Beracara Di PTUN*, Primamedia Pustaka-Gramedia, Jakarta, 1999.
- Soepomo R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Ten Berge, *Bescherming Tegen De Overheid*, W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995.
- Terence Ingman, *The English Legal Process*, Blackstone, London, 1996.
- Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- , *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

## **MAKALAH**

- Krisna Djaya Darumurti, *Materi Kuliah Hukum Jasa Konstruksi MIH UKSW*, 2011.
- Paulus Lotulung, *Menyongsong Pengesahan RUU-AP*, Bimbingan Teknis Hakim Peratun Seluruh Indonesia, Jakarta, 9 Juni 2009.
- Philippus Hadjon, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dengan Perijinan Yang Rawan Gugatan*, Temu Ilmiah HUT PERATUN XIII, Medan, 2004.
- Tatiek Sri Djatmiati, *OOD Dan Tanggung Jawab Jabatan Serta Tanggung Jawab Pribadi Dalam Konteks RUU Administrasi Pemerintahan*, Surabaya, November 2008.

Ten Berge, *Civil and Administrative Procedures in The Netherlands*, Comparison and Future Changes, 1994.

Zain Ahmad, *Memilah Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Praktik Peradilan Perdata*, 7 April 2010.

## **TABLOID**

Indroharto, *Beberapa Catatan Khusus Tentang Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*, Gema Peratun, 1986.

Forum Keadilan, 15 Juli 1996.

## **INTERNET**

<http://my.opera.com>

<http://pengantarilmupolitik.blokspot.com>

<http://pn-kabanjahe.go.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

<http://www.ptun-semarang.go.id>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Dan Ujung Pandang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Pembentukan PTUN Di Bandung, Semarang, Dan Padang.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1992 Tentang Pembentukan PTUN Pontianak, Banjarmasin, Dan Manado.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 Tentang Pembentukan PTUN Kupang, Ambon, dan Jayapura.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994 Tentang Pembentukan PTUN Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan PTUN Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*).

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000-2010

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Restribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.173-Hukham/2011 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991.